



Katalog BPS : 6104006.94

# **PROFIL INDUSTRI MIKRO DAN KECIL PROVINSI PAPUA 2013**



**BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI PAPUA**





Katalog BPS : 6104006.94

# **PROFIL INDUSTRI MIKRO DAN KECIL PROVINSI PAPUA 2013**



**BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI PAPUA**

# **Profil Industri Mikro dan Kecil Provinsi Papua Tahun 2013**

**Nomor Katalog / Catalog Number** : 6104006.94

**Nomor Publikasi / Publication Number** : 9400.1411

**Ukuran Buku / Book Size** : 21 cm x 29,7 cm

**Jumlah Halaman / Page Number** : vii + 32 Halaman / Page

**Naskah / Editor :**

**Bidang Statistik Produksi**

**BPS Provinsi Papua**

***Statistics Production Division***

***BPS-Statistics of Papua Province***

**Gambar Kulit / Art Designer :**

**Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik**

**BPS Provinsi Papua**

***Integration Processing and Diseminasi Statistics Division***

***BPS-Statistics of Papua Province***

**Diterbitkan Oleh / Published by :**

**Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua**

***BPS-Statistics of Papua Province***

**2014**

**Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya**

*May be cited with reference to the source*

## KATA PENGANTAR

Publikasi Profil Industri Mikro dan Kecil (IMK) Tahun 2013 Provinsi Papua ini merupakan hasil pelaksanaan Survei Industri Mikro dan Kecil Tahun 2013 (VIMK13). Survei ini dilaksanakan pada Juli 2013 dengan metode sampel. Publikasi ini menyajikan data tentang kegiatan usaha sektor industri pengolahan yang mempunyai tenaga kerja 1 – 19 orang, yang meliputi antara lain banyaknya perusahaan, persentase tenaga kerja, persentase balas jasa pekerja, persentase pengeluaran dan pendapatan, serta persentase kendala dan pemasaran hasil Industri Mikro dan Kecil di Provinsi Papua.

Diharapkan publikasi ini bermanfaat tidak hanya untuk pemerintah tetapi juga untuk dunia usaha serta bagi para pengguna data yang memerlukannya. Di samping itu data dalam publikasi ini dapat digunakan pula sebagai referensi untuk berbagai penelitian atau studi kasus yang berkaitan dengan Industri Mikro dan Kecil.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi khususnya para responden, nara sumber, serta tim yang telah merampungkan publikasi ini.

Jayapura, Agustus 2014  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Provinsi Papua

**Ir. Didik Koesbianto, M.Si**  
**NIP 19650809 198702 1 001**

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR .....	v
I. PENJELASAN UMUM .....	1
II. ANALISIS DESKRIPTIF	
A. PERUSAHAAN/USAHA .....	20
B. TENAGA KERJA .....	21
C. BALAS JASA PEKERJA .....	23
D. PENGELUARAN .....	23
E. PENDAPATAN .....	24
F. KENDALA USAHA .....	25
G. MODAL .....	26
H. PERBANKAN .....	28
I. KOPERASI .....	28
J. NON-KOPERASI .....	29
K. PEMASARAN .....	30
L. KEMITRAAN .....	31
M. BIMBINGAN USAHA .....	31

## DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

		Halaman
Tabel 1	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil Menurut Kelompok Tenaga Kerja Tahun 2013 .....	21
Gambar 1	Persentase Usaha Mikro dan Kecil Provinsi Papua dan Indonesia Menurut Jenis Industri Mikro/Kecil Tahun 2013 .....	21
Gambar 2	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil Menurut Jumlah Hari Kerja dalam Sebulan Tahun 2013 .....	21
Gambar 3	Persentase Tenaga Kerja pada Usaha Mikro dan Kecil Menurut Status Pekerja dan Jenis Kelamin ....	22
Gambar 4	Jumlah Tenaga Kerja pada Usaha Mikro dan Kecil Menurut Jenis Tenaga Kerja dan Jenis Kelamin .....	22
Gambar 5	Persentase Usaha Mikro dan Kecil Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Pengusaha Tahun 2013 .....	23
Gambar 6	Persentase Usaha Mikro dan Kecil Menurut Kelompok Umur Pengusaha Tahun 2013.....	23
Gambar 7	Persentase Usaha Mikro dan Kecil Menurut Balas Jasa per Pekerja Dibayar per Bulan (000 Rp) Tahun 2013 .....	24
Gambar 8	Persentase Pengeluaran Usaha di Beberapa Wilayah Indonesia Timur terhadap Pengeluaran Usaha di Indonesia Tahun 2013 .....	25

Gambar 9	Persentase Usaha Mikro dan Kecil Menurut Besaran Pendapatan per Triwulan (Jutaan Rp) Tahun 2013 .....	26
Gambar 10	Persentase Usaha Mikro dan Kecil Menurut Jenis Kesulitan Utama Tahun 2013 .....	27
Gambar 11	Persentase Usaha Mikro dan Kecil Menurut Jenis Kesulitan Bahan Baku Tahun 2013.....	27
Gambar 12	Persentase Usaha Mikro dan Kecil di Beberapa Wilayah Indonesia Timur Menurut Sumber Modal Tahun 2013 .....	28
Gambar 13	Persentase Usaha Mikro dan Kecil Menurut Asal Pinjaman Utama Tahun 2013 .....	29
Gambar 14	Persentase Usaha Mikro dan Kecil Menurut Alasan Utama Tidak Meminjam dari Bank Tahun 2013.....	29
Gambar 15	Persentase Usaha Mikro dan Kecil Menurut Keanggotaan Koperasi Tahun 2013 .....	30
Gambar 16	Persentase Usaha Mikro dan Kecil Menurut Jenis Pelayanan Koperasi yang Diterima Tahun 2013.....	30
Gambar 17	Persentase Usaha Mikro dan Kecil Menurut Jenis Bantuan Non-Koperasi yang Diterima Tahun 2013	31

Gambar 18	Persentase Usaha Mikro dan Kecil di Beberapa Wilayah Indonesia Timur Menurut Wilayah Pemasaran Hasil Produksi Perusahaan Tahun 2013	32
Gambar 19	Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang Menjalinkan Kemitraan dengan Usaha Lain Menurut Jenis Kemitraan yang Diterima Tahun 2013 .....	33
Gambar 20	Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang Tenaga Kerjanya Pernah Mengikuti Bimbingan Usaha Menurut Jenis Bimbingan Usaha Tahun 2013 .....	34
Gambar 21	Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang Tenaga Kerjanya pernah mengikuti Bimbingan Usaha Menurut Penyelenggara Bimbingan Usaha Tahun 2013 .....	34



## I. PENJELASAN UMUM

### A. Pendahuluan

Salah satu cara yang paling konstruktif dalam merealisasikan visi kesejahteraan lahir dan bathin bagi masyarakat, adalah dengan menggunakan sumber daya manusia secara efisien dan produktif dengan suatu cara yang membuat setiap individu mampu mempergunakan kemampuan yang dimiliki dalam mewujudkan kesejahteraan masing-masing. Dalam era reformasi, perekonomian dibangun berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan (EKORA). Komponen utama sistem ekonomi kerakyatan adalah sumberdaya manusia sebagai konsumen, sebagai tenaga kerja dan sebagai pengusaha. Dengan demikian sistem ekonomi kerakyatan merupakan tatanan ekonomi yang memberikan kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mencapai peningkatan kesejahteraan secara merata dan berkeadilan. Secara kongkret, upaya peningkatan ekonomi kerakyatan harus dilakukan dalam berbagai program, diantaranya pembangunan Industri Mikro dan Kecil (IMK).

IMK mempunyai peran yang sangat vital dalam pembangunan ekonomi. Hal ini disebabkan intensitas tenaga kerja yang relatif lebih tinggi dan jumlah investasi yang relatif kecil, maka usaha IMK dapat lebih fleksibel dan beradaptasi terhadap perubahan pasar. IMK tidak terlalu berpengaruh oleh tekanan eksternal, karena dapat tanggap menangkap peluang untuk substitusi impor dan meningkatkan (*supply*) persediaan domestik. Pengembangan IMK dapat memberikan kontribusi pada diversifikasi industri dan percepatan perubahan struktur sebagai pra kondisi pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang stabil dan berkesinambungan.

Survei Industri Mikro dan Kecil 2013 (VIMK13) diselenggarakan untuk mendata keberadaan, penyebaran, aktivitas, dan karakteristik kegiatan IMK. Pendekatan pencacahan dalam VIMK13 Sampel dilakukan melalui pendekatan perusahaan/usaha. Sasaran pencacahan perusahaan/usaha berskala mikro dan kecil.

## **B. Tujuan**

Secara umum VIMK13 bertujuan untuk mengetahui profil IMK daerah potensi di Indonesia yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan kegiatan ekonomi secara makro. VIMK13 mengumpulkan dan menyajikan data tentang kegiatan perusahaan/usaha berskala mikro dan kecil yang rinci dan mutakhir menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) pada tingkat nasional.

Secara khusus tujuan VIMK13 adalah mendapatkan informasi dasar tentang berbagai informasi mengenai kegiatan ekonomi menurut 2 digit KBLI, seperti:

- a. Banyaknya usaha
- b. Banyaknya tenaga kerja
- c. Pengeluaran untuk tenaga kerja
- d. Struktur input dan output
- e. Permodalan
- f. Kendala dan prospek usaha
- g. Keterangan lain yang berkaitan dengan usaha IMK

### C. Lingkup dan Cakupan

VIMK13 ini dilaksanakan di 17 kabupaten/kota di daerah potensi di Provinsi Papua dengan jumlah blok sensus terpilih sebanyak 144 blok sensus dan mencakup 340 perusahaan/usaha mikro dan kecil. Sasaran pencacahan meliputi perusahaan/usaha industri mikro dengan banyaknya tenaga kerja 1-4 orang dan industri kecil dengan tenaga kerja 5-19 orang termasuk pengusaha/pemilik.

### D. Dokumen yang digunakan

Penggunaan jenis daftar dan buku pedoman untuk pencacahan perusahaan/usaha industri mikro dan kecil 2013 adalah sebagai berikut:

1. **VIMK12-DSBS (Daftar Sampel Blok Sensus)**, digunakan untuk mengetahui identitas blok sensus terpilih.
2. **VIMK12-L (Listing)**, digunakan untuk pendaftaran perusahaan/usaha dalam blok sensus terpilih.
3. **VIMK12-DS (Daftar Sampel)**, digunakan untuk mengetahui nama dan alamat perusahaan/usaha yang akan dicacah.
4. **VIMK12-S (Sampel)**, digunakan untuk mencacah perusahaan/usaha terpilih.
5. **VIMK12-RB (Rekap Blok sensus)**, digunakan untuk merekap jumlah Industri Mikro dan Kecil per blok sensus.
6. Buku pedoman teknis, pedoman pencacah, pedoman pemeriksaan/pengawasan, buku KBLI industri manufaktur, dan pedoman pengolahan.

## **E. Metodologi**

### **1. Kerangka Sampel**

Kerangka sampel blok sensus yang digunakan pada kegiatan VIMK13 adalah Daftar Blok Sensus terpilih pada Survei Industri Mikro dan Kecil 2010 (VIMK10-DSBS). Dengan demikian, sampel blok sensus terpilih VIMK12 adalah merupakan subsampel dari blok sensus VIMK10.

DSBS-VIMK10 adalah daftar blok sensus terpilih pada Survei Industri Mikro dan Kecil 2010 yang dilengkapi dengan muatan jumlah usaha industri mikro dan kecil hasil pengolahan Daftar VIMK10-L. Walaupun pada saat pelaksanaan VIMK10 blok sensusnya sudah distratakan, namun untuk proses *updating*, sebelum digunakan perlu dilakukan proses re-stratifikasi lagi berdasarkan data hasil listing dan survei sampel VIMK10.

### **2. Stratifikasi Blok Sensus**

Re-stratifikasi ditujukan untuk mengelompokkan unit-unit area (blok sensus) menurut komposisi jumlah relatif usaha IMK menurut jenis Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Untuk setiap jenis KBLI, strata konsentrasi yang bersesuaian dengan jenis usaha adalah merupakan sekelompok blok sensus dengan komposisi jenis usaha yang dominan (menonjol). Mengingat jumlah alokasi sampel blok sensus per-Provinsi relatif tidak banyak maka, stratifikasi dilakukan pada level Provinsi.

### **3. Prosedur Penarikan Sampel**

Rancangan penarikan sampel yang digunakan yaitu rancangan penarikan sampel dua tahap terstratifikasi.

**Tahap pertama:** adalah memilih sejumlah blok sensus pada setiap strata secara PPS (*Probability Proportional to Size*) dengan *size* banyaknya IMK hasil listing VIMK10. Penarikan sampel blok sensus antar strata dilakukan secara *independent*.

Kerangka sampel yang digunakan yaitu daftar blok sensus hasil re-stratifikasi dalam satu provinsi.

**Tahap kedua:** mengambil seluruh industri kecil (kecuali jika ada Provinsi dengan jumlah Industri Kecilnya melebihi jumlah target sampel maka dilakukan pemilihan sampel) dan memilih sejumlah industri mikro dari hasil listing secara sistematis linier untuk setiap jenis usaha sesuai KBLI pada blok sensus terpilih.

#### 4. Penyajian

Informasi mengenai profil industri mikro dan kecil 2013 Provinsi Papua hanya dapat disajikan dalam bentuk persentase saja, karena BPS Provinsi Papua tidak mengestimasi populasi. Estimasi populasi hanya dilakukan di BPS-RI.

#### F. Organisasi Lapangan

Untuk memperlancar pelaksanaan lapangan kegiatan VIMK13, struktur organisasi lapangan telah ditetapkan struktur organisasi lapangan yang penanggungjawab pelaksanaannya di daerah adalah Kepala Bidang Statistik Produksi dan sebagai subject matter adalah Subdit Statistik Industri Kecil dan Rumah Tangga.

Petugas yang terkait dalam VIMK12 adalah:

- a. Petugas Pencacah Sampel (PCS) : Koordinator Statistik Kecamatan (KSK)/Staf BPS
- b. Petugas Pemeriksa (PMS) : Staf BPS Provinsi/Kabupaten/Kota
- c. Koordinator pelaksanaan di Kecamatan : KSK (aparatus BPS pada tingkat kecamatan)
- d. Koordinator pelaksanaan di tingkat Kabupaten/Kota : Kepala BPS Kabupaten/Kota
- e. Koordinator pelaksanaan di tingkat Provinsi : Kepala BPS Provinsi

### G. Konsep dan Definisi

Konsep definisi sangat diperlukan agar persepsi terhadap informasi yang dihasilkan tidak bias. Beberapa hal yang perlu didefinisikan dari kegiatan VIMK13.

- a. **Industri Manufaktur:** Kegiatan produksi yang mengubah barang dasar (bahan mentah) menjadi barang jadi/setengah jadi dan atau dari barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya. Termasuk ke dalam kategori ini adalah kegiatan jasa industri manufaktur (*makloon*).
- b. **Perusahaan/Usaha Industri Manufaktur:** Unit kegiatan ekonomi yang melakukan/mengusahakan industri manufaktur; terletak pada suatu bangunan/lokasi tertentu serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut.
- c. **Perusahaan/Usaha Jasa Industri Manufaktur:** Unit kegiatan dari suatu industri yang melayani keperluan pihak lain. Pada kegiatan ini bahan baku disediakan oleh pihak yang dilayani dan pihak perusahaan/usaha

melaksanakan proses pengolahannya dengan memperoleh pembayaran sebagai balas jasanya (nilai upah makloon).

**d. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)** merupakan klasifikasi baku statistik mengenai kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia. KBLI hanya mengelompokkan unit produksi menurut kegiatan ekonomi, tidak membedakan unit produksi menurut kepemilikan, jenis badan hukum, formal atau informal. KBLI 2009 menggunakan kode 5 digit yang menunjukkan struktur klasifikasi.

**e. Produksi Utama**

Produksi utama yang dihasilkan usaha ini ditentukan berdasarkan:

- 1) Produksi yang mempunyai **nilai produksi/jasa** industri terbesar;
- 2) Jika nilai produksi/jasa industri sama besar, maka produksi yang menghasilkan barang/jasa dengan **volume** terbesar;
- 3) Jika nilai produksi/jasa industri dan volume barang/jasa sama, maka produksi yang menghasilkan barang/jasa dengan **waktu** terlama;
- 4) Jika nilai produksi/jasa industri, volume, dan waktu yang diperlukan sama, maka ditentukan menurut **pengakuan** responden.

**f. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan**

- 1) Tidak tamat SD: Mereka yang tidak sekolah/belum pernah sekolah atau mereka yang pernah sekolah/tidak tamat di sekolah dasar 5/6/7 tahun, Sekolah Luar Biasa Tingkat Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Pamong (Pendidikan anak oleh Masyarakat Orang Tua dan Guru), Sekolah Dasar Kecil, Paket A1 - A100. Mereka yang tamat Sekolah Dasar 3 tahun atau sederajat dianggap belum tamat.
- 2) **SD & sederajat**: Mereka yang tamat sekolah dasar 5/6/7 tahun, Sekolah Luar Biasa Tingkat Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah

Dasar Pamong (Pendidikan anak oleh Masyarakat Orang Tua dan Guru), Sekolah Dasar Kecil, Paket A1 - A100.

- 3) **SLTP & sederajat:** Mereka yang tamat SMP, MULO, HBS 3 tahun, SLB Menengah Tingkat Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Kepandaian Putri, SMEP, ST, Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama, Sekolah Ketrampilan Kejuruan 4 tahun, Sekolah Usaha Tani, Sekolah Pertanian Menengah Pertama, Sekolah Guru Bantu, Pendidikan Guru Agama 4 tahun, Kursus Pegawai Administrasi, Kursus Karyawan Perusahaan, dan Pendidikan Pegawai Urusan Peradilan Agama.
- 4) **SLTA & sederajat:** Mereka yang tamat dari Sekolah Menengah Atas, HBS 5 tahun, AMS, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial, Sekolah Menengah Industri Kerajinan, Sekolah Menengah Seni Rupa, Sekolah Menengah Karawitan Indonesia, Sekolah Menengah Musik, Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan, Sekolah Menengah Ekonomi Atas, Sekolah Teknologi Menengah, Sekolah Menengah Teknologi Pertanian, Sekolah Menengah Teknologi Perkapalan, Sekolah Menengah Teknologi Pertambangan, dan Sekolah Menengah Teknologi Grafika.
- 5) **DI/DII:** Mereka yang tamat Sekolah Guru Olah Raga, Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama, Pendidikan Guru Agama 6 tahun, Sekolah Guru Taman Kanak-Kanak, Kursus Pendidikan Guru, Sekolah Analisis Menengah Kimia Atas, Sekolah Asisten Apoteker, Sekolah Bidan, Sekolah Pengatur Rontgen, dan Kursus Pegawai Administrasi Atas, Diploma I atau Diploma II pada suatu pendidikan yang khusus diberikan untuk program diploma. Program Akta I dan Akta II termasuk dalam jenjang pendidikan program Diploma I atau Diploma II.

- 6) **Sarjana Muda/DIII:** Mereka yang tamat Akademi/Diploma III/Akta III atau yang telah mendapatkan gelar sarjana muda pada suatu fakultas. Bagi mereka yang telah menempuh pendidikan sampai semester 8/9 dan belum tamat di fakultas yang tidak mengeluarkan gelar sarjana muda, dinyatakan sebagai tamatan SLTA & sederajat.
- 7) **DIV, S1 atau Lebih:** Mereka yang tamat program pendidikan Diploma IV, Sarjana (Strata-1), Magister (Strata-2), dan Doktor (Strata-3). Jenjang sekolah ini pada umumnya dilakukan oleh suatu Universitas/Institut/Sekolah Tinggi.

#### **g. Tahun mulai beroperasi/berproduksi secara komersial**

Tahun pertama kali perusahaan menghasilkan/memproduksi barang/jasa secara komersial (tidak termasuk produksi percobaan). Bila terjadi perubahan KBLI, maka yang ditulis tahun pada KBLI yang baru. Suatu usaha yang membuka cabang di suatu daerah, maka tahun mulai beroperasi adalah tahun dibukanya cabang di tempat tersebut.

#### **h. Tenaga Kerja**

- 1) **Tenaga kerja tetap dibayar:** Tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan/usaha dengan mendapat balas jasa berupa gaji dan lainnya (lembur, hadiah, bonus, dll) dalam bentuk uang maupun barang.
- 2) **Tenaga kerja tetap tidak dibayar:** Tenaga kerja pemilik dan atau tenaga kerja keluarga yang biasanya aktif dalam kegiatan perusahaan/usaha, tetapi tidak mendapat balas jasa. Bagi pekerja tidak dibayar yang bekerja kurang dari 1/3 (sepertiga) jam kerja yang biasa berlaku (dalam satu minggu) di perusahaan/usaha tidak termasuk sebagai pekerja.

- 3) **Tenaga kerja produksi:** Tenaga kerja yang langsung bekerja/berhubungan dalam proses produksi. Misal: tenaga kerja yang langsung mengawasi proses produksi, mengoperasikan mesin, mencatat bahan baku yang digunakan dan barang yang dihasilkan.
  - 4) **Tenaga kerja lainnya:** Tenaga kerja yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Tenaga kerja ini biasanya sebagai tenaga kerja pendukung perusahaan, seperti; manager (bukan produksi), kepala personalia, sekretaris, tukang ketik, penjaga malam, sopir perusahaan, dll.
- i. **Balas jasa pekerja dibayar (dalam rupiah):** Balas jasa pekerja dibayar dibedakan upah pekerja tetap dan tidak tetap.
- 1) **Upah/gaji:** Balas jasa perusahaan untuk pekerja/karyawan, sebelum dikurangi pajak baik dalam bentuk uang maupun barang. Perkiraan sewa rumah dinas, fasilitas kendaraan dan sejenisnya dimasukkan dalam upah dan gaji walaupun tidak tertulis dalam neraca (catatan) perusahaan.
  - 2) **Upah lembur:** Upah yang diberikan/dibayarkan kepada pekerja yang bekerja di luar jam kerja biasa.
  - 3) **Hadiah:** Pengeluaran perusahaan/usaha berupa uang dan atau barang yang diberikan kepada pekerja/karyawan. Pengeluaran ini sifatnya hanya sewaktu-waktu saja. Pengeluaran selama sebulan diperoleh dengan menjumlahkan pengeluaran selama setahun dibagi 12.
  - 4) **Bonus:** Pemberian perusahaan/usaha kepada pekerja dalam bentuk uang atau barang karena perusahaan/usaha mengalami kemajuan/peningkatan keuntungan, yang biasanya dibayarkan

setahun sekali, oleh karenanya untuk mengetahui besarnya bonus dalam sebulan terlebih dulu dibagi 12.

- 5) **Tunjangan:** Pengeluaran perusahaan/usaha berupa uang dan atau barang yang dibayarkan kepada instansi/yayasan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja/karyawan.
- j. **Biaya Umum:** Biaya yang dikeluarkan untuk menunjang kegiatan perusahaan/usaha meliputi:
- 1) **Bahan Baku:** Komponen bahan yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang/jasa.
  - 2) **Bahan Penolong:** Bahan yang digunakan untuk membantu proses produksi dari bahan baku menjadi barang produksi, tidak termasuk bahan penolong: pembungkus, pengepak, dan pengikat barang jadi.
  - 3) **Bahan Bakar:** Segala bahan, baik cair maupun padat yang digunakan sebagai pembakar untuk menjalankan mesin, memasak dan lainnya yang dipakai untuk usaha, seperti: bensin, solar, minyak tanah, LPG, batu bara/briket, kayu bakar, arang dan bahan bakar lainnya.
  - 4) **Pelumas:** Zat cair yang mempunyai kekentalan tertentu dipakai untuk melancarkan jalannya mesin agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya, seperti SAE 20, SAE 30 dan sebagainya. Termasuk juga biaya bahan bakar dan pelumas untuk mesin pembangkit listrik (diesel) yang digunakan perusahaan.
  - 5) **Pemakaian Listrik**  
**Biaya listrik:** Biaya seluruh pemakaian listrik untuk keperluan perusahaan/usaha, seperti untuk penerangan dan menjalankan mesin.

6) **Pemakaian Air**

**Biaya pemakaian air bersih:** Biaya pembelian air bersih dari perusahaan air minum/badan pengelola air minum ataupun dari pihak lain untuk keperluan perusahaan/usaha.

7) **Pemakaian gas kota**

**Biaya gas kota:** Biaya seluruh pemakaian gas kota untuk keperluan perusahaan/usaha.

8) **Alat tulis dan keperluan kantor:** Semua alat tulis dan keperluan kantor yang habis dipakai seperti: kertas, spidol, pensil, tinta, karbon, pita mesin tik, map, kapur tulis, dan sejenisnya.

9) **Bunga atas pinjaman:** Pengeluaran perusahaan untuk pembayaran bunga atas pinjaman modal kepada pihak lain, misal: bunga yang dibayarkan ke Bank, Pegadaian, dsb. Bunga yang dibayarkan tidak harus terhadap pinjaman pada tahun 2013, tetapi termasuk bunga atas pinjaman tahun sebelumnya.

10) **Angkutan/pengiriman, pos dan telekomunikasi:** Seluruh biaya pengangkutan/ pengiriman, pos dan telekomunikasi yang digunakan untuk kelancaran usaha.

11) **Pemeliharaan dan perbaikan kecil barang modal:** Pengeluaran rutin untuk memelihara atau memperbaiki barang modal agar tetap berfungsi seperti biasanya tanpa menambah kapasitas, mengubah bentuk atau menambah umur barang modal tersebut, seperti biaya penggantian suku cadang, pemeliharaan mesin-mesin dan perbaikan bangunan tempat usaha yang sifatnya tidak memperluas.

12) **Sewa mesin, alat perlengkapan, kendaraan, bangunan/konstruksi, dan barang modal lainnya**

Pengeluaran yang digunakan untuk keperluan usaha dan rumah tangga dimasukkan sebagai pengeluaran untuk usaha, kecuali pengeluaran untuk bangunan/konstruksi yang disewa. Penghitungan sewa bangunan dilakukan secara proporsional antara penggunaan bangunan untuk usaha dan rumah tinggal. Pengisian besarnya sewa bangunan/konstruksi hanya yang digunakan untuk usaha saja, tidak termasuk untuk kegiatan rumah tangga.

13) **Sewa tanah untuk usaha:** Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan/usaha selama sebulan yang lalu (bulan terakhir berproduksi sebelum pencacahan) atas penggunaan tanah milik pihak lain.

14) **Pajak tak langsung:** Pajak yang dikenakan kepada konsumen melalui produsen terhadap pembelian barang/jasa, misalnya: pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak bumi dan bangunan, bea masuk dan cukai, pajak ekspor, pajak hiburan dan retribusi (termasuk retribusi papan nama, iklan, dsb), termasuk biaya STNK dan retribusi uji petik (kir) khusus untuk kendaraan operasional perusahaan/usaha. Tidak termasuk pajak yang dibayarkan oleh perusahaan untuk pemotongan pajak balas jasa pekerja.

15) **Jasa lainnya**

**Pembayaran jasa lainnya:** Seluruh pengeluaran atau jasa pihak lain yang dikeluarkan oleh perusahaan/usaha untuk kelancaran kegiatan/usaha ini seperti asuransi perusahaan, promosi/iklan, pengacara dll.

**Biaya jasa akuntan/konsultan:** Biaya yang dikeluarkan perusahaan/usaha kepada akuntan/konsultan, seperti: biaya

penyusunan sistem dan pelaksanaan pembukuan, biaya pemeriksaan pembukuan dan penyusunan laporan, biaya konsultasi hukum, konsultasi keuangan dll.

**Biaya untuk asuransi kerugian:** Premi yang dibayar oleh perusahaan/usaha kepada perusahaan asuransi atas barang yang diasuransikan, seperti: asuransi kebakaran, asuransi kendaraan dan asuransi barang modal lainnya.

**Promosi/iklan:** Biaya untuk promosi/iklan yang dilakukan oleh perusahaan sendiri misalnya pasang spanduk, papan reklame (perusahaan membayar pajak reklame/iklan).

#### **k. Pendapatan**

Pendapatan meliputi pendapatan utama, pendapatan dari jasa industri (makloon), pendapatan dari kegiatan lain, dan pendapatan lainnya.

- 1) **Pendapatan utama:** Nilai barang yang dihasilkan oleh suatu industri, baik produksi utama, sampingan maupun ikutan. Termasuk dalam produksi adalah barang yang telah siap untuk dipasarkan dan barang yang masih dalam proses (setengah jadi). Semua barang hasil produksi harus dinilai walaupun belum terjual, sudah terjual (tunai maupun kredit), dikonsumsi sendiri, dihadiahkan, dan sebagainya.
- 2) **Pendapatan dari kegiatan Lain:** Pendapatan yang diperoleh perusahaan dari kegiatan bukan utama tapi masih merupakan satu kesatuan usaha dan bukan merupakan kegiatan utama.
- 3) **Pendapatan lainnya:** Pendapatan/penerimaan dari kegiatan lain yang berkaitan dengan usaha seperti bunga atas simpanan di pihak lain atau meminjamkan ke pihak lain, deviden, royalti/hak cipta dan

sejenisnya yang diterima, dan transfer dari pihak lain (sumbangan dan hadiah).

#### **I. Harta yang dimiliki**

- 1) **Harta:** Kekayaan yang berasal dari milik sendiri dan digunakan dalam suatu proses produksi sebagai suatu usaha ekonomi.
- 2) **Harta lancar:** Meliputi seluruh uang tunai, piutang usaha, dan barang-barang produksi/bahan baku/penolong yang tersedia.
- 3) **Harta tetap:** Peralatan dan perlengkapan usaha yang digunakan sebagai sarana/alat berproduksi/berusaha yang umumnya mempunyai umur pemakaian lebih dari setahun meliputi:
  - a. Tanah
  - b. Bangunan/gedung
  - c. Mesin dan perlengkapan seperti: mesin jahit, kompor, lemari, dan sebagainya
  - d. Kendaraan
  - e. Harta tetap lainnya (hak cipta, hak paten)

**m. Sumber modal:** Menunjukkan kondisi yang sah secara hukum atas pemilikan modal usaha, modal lancar maupun modal tetap. Sumber modal dapat berasal dari:

- 1) **Milik sendiri:** Merupakan harta milik perusahaan/usaha sendiri tanpa adanya kontribusi/partisipasi dari perusahaan/ usaha/ pihak lain. Untuk usaha yang modalnya berasal dari 2 orang atau lebih dan orang tersebut ikut serta dalam pengelolaan usaha, dimasukkan sebagai modal sendiri.
- 2) **Pihak lain:** Merupakan harta milik pihak lain, pengusaha tidak mempunyai kontribusi sama sekali. Yang dimaksud pihak lain dalam

IMK12 adalah bank, koperasi, lembaga keuangan bukan bank, modal ventura, perorangan, keluarga dan lainnya.

- a) **Bank:** Institusi/lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan untuk melakukan kegiatan menerima, menyimpan, dan meminjamkan uang. Dalam hal tertentu untuk kemudian transaksi uang, bank juga mempunyai kewenangan untuk menerbitkan cek, atau surat berharga.
- b) **Koperasi:** Organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
- c) **Lembaga Keuangan Bukan Bank:** Lembaga keuangan selain Bank dan Koperasi, seperti misalnya pegadaian, sewa guna usaha (leasing), modal ventura, anjak piutang (factoring), lembaga kredit (perorangan maupun perusahaan) dan sebagainya.
- d) **Modal Ventura:** Badan usaha yang melakukan kegiatan penyertaan modal ke dalam perusahaan pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu, tidak termasuk Bank Muamalat/Bank Syariah.
- e) **Keluarga/famili:** Pihak-pihak yang masih mempunyai hubungan saudara/famili, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hubungan secara langsung adalah hubungan sedarah, sedangkan hubungan tidak langsung merupakan pertalian karena adanya perkawinan.
- f) **Lainnya:** Pihak lain yang bukan merupakan kegiatan bank, koperasi, Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), keluarga dan pinjaman perorangan.

## **n. Kendala dan Pemasaran**

Bagian ini menjelaskan tentang kendala usaha pada 2013, keanggotaan koperasi, kemitraan usaha, bimbingan usaha, dan wilayah pemasaran.

### **1) Bimbingan/pelatihan/penyuluhan:**

Bimbingan/pelatihan/penyuluhan yang diikuti tenaga kerja selama tenaga kerja tersebut bekerja pada perusahaan/usaha responden dan ditugaskan oleh perusahaan, meskipun pelatihan yang diikuti tidak diselenggarakan oleh perusahaan yang bersangkutan.

### **2) Bimbingan/pelatihan/penyuluhan manajerial:** Jenis bimbingan/penyuluhan untuk meningkatkan keterampilan, pengelolaan usaha secara umum.

### **3) Bimbingan/ pelatihan/ penyuluhan keterampilan/ teknik produksi:** Jenis bimbingan/penyuluhan untuk meningkatkan kemampuan/keterampilan dalam teknik produksi.

### **4) Bimbingan/penyuluhan pemasaran:** Jenis bimbingan/ penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan tentang pemasaran, seperti cara mempelajari kebutuhan dan keinginan konsumen, cara melakukan penjualan dan promosi.

### **5) Kemitraan:** Hubungan kerjasama dengan perusahaan/usaha lain (termasuk BUMN/BUMD) yang saling menguntungkan, memperkuat dan mendukung.

## H. Data yang Disajikan

Data yang disajikan pada publikasi Profil Industri Mikro dan Kecil 2013 ini, menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) rev. 4 Tahun 2009 dengan rincian sebagai berikut :

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Industri Makanan  | KBLI : 10 |
| 2. Industri Minuman  | KBLI : 11 |
| 3. Industri Tekstil  | KBLI : 13 |
| 4. Industri Pakaian Jadi   | KBLI : 14 |
| 5. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki   | KBLI : 15 |
| 6. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (tidak termasuk furnitur), dan Barang Anyaman dari Rotan, Bambu dan sejenisnya. | KBLI : 16 |
| 7. Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman  | KBLI : 18 |
| 8. Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional  | KBLI : 21 |
| 9. Industri Barang Galian Bukan Logam  | KBLI : 23 |
| 10. Industri Barang Logam bukan Mesin dan Peralatannya   | KBLI : 25 |
| 11. Industri Alat Angkut Lainnya   | KBLI : 30 |
| 12. Industri Furnitur  | KBLI : 31 |
| 13. Industri Pengolahan Lainnya  | KBLI : 32 |
| 14. Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan   | KBLI : 33 |

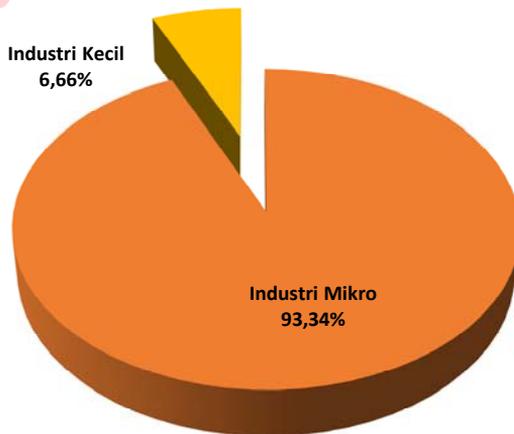
## II. ANALISIS DESKRIPTIF

### INDUSTRI MANUFAKTUR MIKRO DAN KECIL

Sektor industri merupakan salah satu komponen utama dalam pembangunan ekonomi Papua. Pembangunan bidang industri merupakan bagian dari pembangunan Papua yang harus dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan, sehingga pembangunan bidang industri dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

Industri Mikro dan Kecil (IMK) merupakan salah satu komponen dari sektor industri manufaktur yang meskipun mempunyai sumbangan yang tidak terlalu besar terhadap pembentukan ekonomi Papua, tetapi ikut berperan dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan pemerataan pendapatan di Papua. Usaha IMK umumnya merupakan usaha rumah tangga yang sebagian besar masih bercampur dengan tempat tinggalnya, dan masih memerlukan pembinaan yang terus menerus agar masalah yang dihadapi seperti masalah pemasaran, permodalan dan pengelolaan dapat segera diatasi.

**Gambar 1. Persentase Usaha Mikro dan Kecil Menurut Jenis Industri Mikro dan Kecil Tahun 2013**



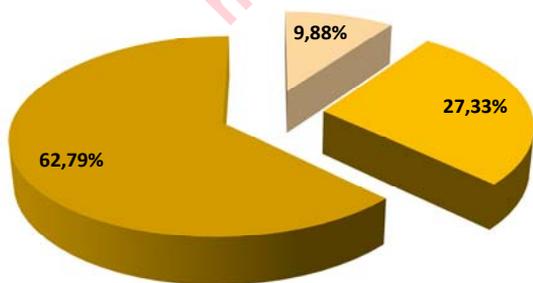
## A. PERUSAHAAN/USAHA

Hasil Survei Industri Mikro dan Kecil Tahun 2013 (VIMK13) di Provinsi Papua tercatat bahwa perusahaan/usaha IMK sebanyak 9.955 usaha (Tabel 1). Banyaknya perusahaan/usaha diurutkan dari kelompok tenaga kerja yang terbanyak, yaitu kelompok tenaga kerja 2 – 4 orang sebanyak 7.190 usaha (72,22 persen), kelompok tenaga kerja 1 orang sebanyak 2.102 usaha (21,12 persen), kelompok tenaga kerja 5 – 9 orang sebanyak 557 usaha (5,60 persen), kelompok tenaga kerja 10 – 14 orang sebanyak 58 usaha (0,58 persen), dan kelompok tenaga kerja 15 – 19 orang sebanyak 48 usaha (0,48 persen).

**Tabel 1** Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil Menurut Kelompok Tenaga Kerja Triwulan I Tahun 2013

Kelompok Tenaga Kerja	Provinsi Papua	Indonesia
(1)	(2)	(3)
1	2.102	1.195.819
2 – 4	7.190	1.691.196
5 – 9	557	391.140
10 – 14	58	95.273
15 – 19	48	44.938
<b>Jumlah</b>	<b>9.955</b>	<b>3.418.366</b>

**Gambar 2. Persentase Usaha Mikro dan Kecil Menurut Jumlah Hari Kerja dalam Sebulan Tahun 2013**

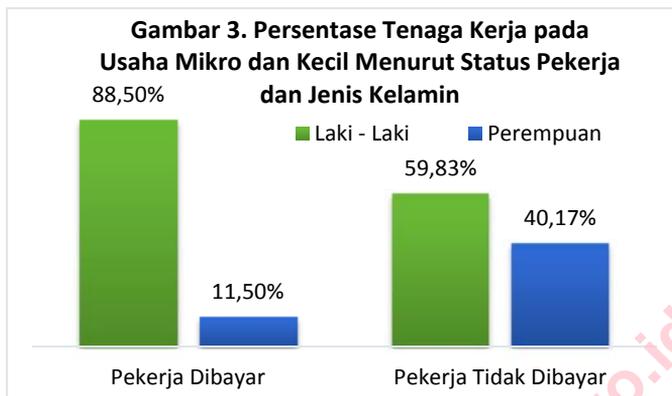


- 1 -10 hari kerja dalam sebulan dengan rata - rata 6 jam kerja per hari
- 11 - 20 hari kerja dalam sebulan dengan rata - rata 6 jam kerja per hari
- 21 - 31 hari kerja dalam sebulan dengan rata - rata 8 jam kerja per hari

Rata-rata hari kerja dalam sebulan pada usaha IMK umumnya 21-31 hari kerja dalam sebulan, yaitu sebanyak 62,79 persen dengan rata-rata jam kerja per hari sekitar 8 (delapan) jam. Sementara itu, usaha yang mempunyai rata-rata hari kerja dalam sebulan antara 11-20 hari sebanyak 27,33 persen, dan selebihnya sebanyak 9,88 persen hanya bekerja dalam

sebulan antara 1-10 hari.

## B. TENAGA KERJA



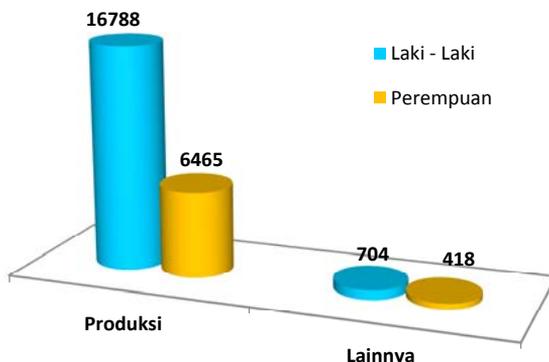
Perusahaan/ usaha IMK di Provinsi Papua pada 2013 terdiri dari pekerja dibayar sebanyak 41,63 persen (88,50 persen pekerja laki-laki dan 11,50 persen pekerja

perempuan) dan 58,37 persen pekerja tidak dibayar (59,83 persen pekerja laki-laki dan 40,17 persen pekerja perempuan). Banyaknya tenaga kerja tidak dibayar ini cukup tinggi kemungkinan karena sebagian besar usaha adalah industri mikro, sehingga banyak menggunakan pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar.

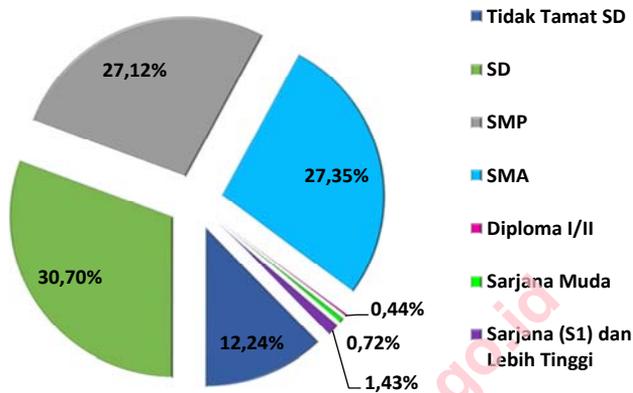
Sebaran banyaknya tenaga kerja menurut jenis tenaga kerja, terdiri dari pekerja produksi sebanyak 23.253 orang (72,20 persen pekerja laki-laki dan 27,80 persen pekerja perempuan) dan pekerja lainnya sebanyak 1.122 orang (62,75 persen pekerja laki-laki dan 37,25 persen pekerja perempuan).

Pekerja produksi lebih banyak pekerja laki-laki kemungkinan karena pekerjaannya lebih membutuhkan tenaga fisik dan ketrampilan yang memadai.

**Gambar 4. Jumlah Tenaga Kerja pada Usaha Mikro dan Kecil Menurut Kerja dan Jenis Kelamin**



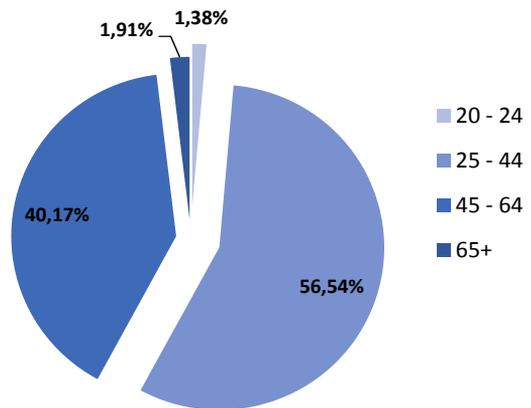
**Gambar 5. Persentase Usaha Mikro dan Kecil Menurut Pendidikan yang Ditamatkan Pengusaha, 2013**



Jika dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan, pengusaha IMK sebagian besar adalah lulusan SD (30,70%) dan SLTA (27,35%). Hal ini menunjukkan bahwa usaha IMK tidak terlalu membutuhkan ketrampilan khusus tertentu.

Sedangkan jika dilihat dari umur pengusaha, pengusaha IMK sebagian besar tergolong pada kelompok umur 25 – 44 tahun sebesar 56,54 persen dan kelompok umur 45 – 64 tahun sebesar 40,17 persen. Tidak ada pengusaha IMK yang berumur di bawah 20 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pengusaha IMK di Papua sebagian besar berada di usia produktif.

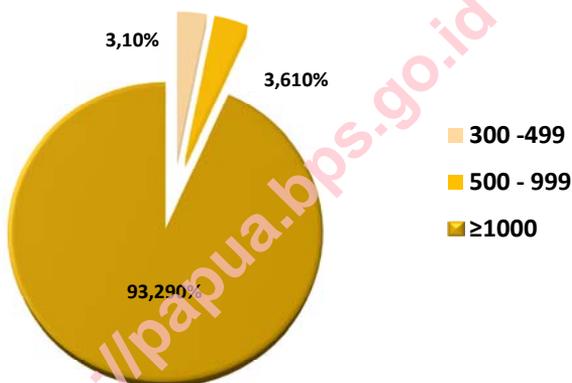
**Gambar 6. Persentase Usaha Mikro dan Kecil Menurut Umur Pengusaha, 2013**



### C. BALAS JASA PEKERJA

Sebagian besar (93,29 persen) balas jasa yang diterima per pekerja dibayar di Provinsi Papua yaitu satu juta atau lebih per bulan. Sisanya balas jasa pekerja dibayar berada pada kisaran Rp 500 ribu s/d Rp 999 ribu yaitu sekitar 3,61 persen dan Rp 300 ribu s/d Rp 449 ribu yaitu sekitar 3,10 persen.

**Gambar 7. Persentase Usaha Mikro dan Kecil Menurut Besarnya Balas Jasa Pekerja Dibayar Per Bulan (000), 2013**



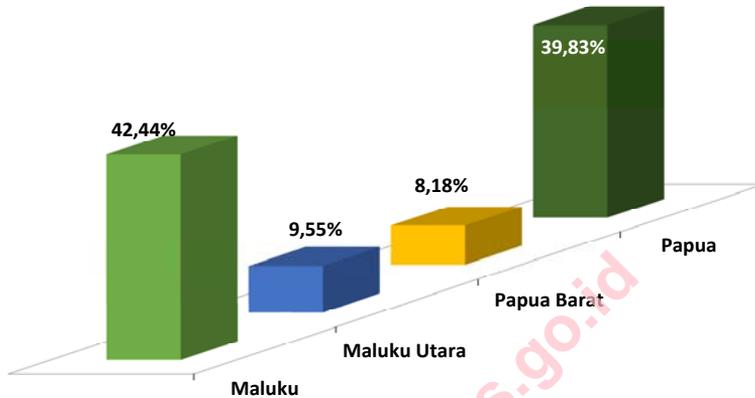
Cukup besarnya balas jasa pekerja dibayar per bulan ini menunjukkan bahwa balas jasa pekerja pada usaha IMK di Provinsi Papua sudah cukup baik, karena mendekati rata-rata UMR (Upah Minimum Regional) Papua.

### D. PENGELUARAN

Dalam menjalankan usaha, pengusaha IMK tidak terlepas dari biaya pengeluaran yang meliputi bahan baku dan penolong, pengeluaran untuk bahan bakar dan pelumas, listrik, gas dan air, alat tulis dan keperluan kantor, angkutan/pengiriman, pos dan telekomunikasi, sewa gedung, sewa mesin, sewa alat-alat, biaya pemeliharaan dan perbaikan kecil barang modal, serta jasa lainnya (kecuali pengeluaran untuk balas jasa pekerja).

Dari sekitar 9.955 usaha IMK yang ada di Provinsi Papua pada 2013, pengeluaran usaha sekitar 0,29 persen dari pengeluaran usaha di Indonesia, salah satunya yaitu balas jasa pekerja sebesar 0,65 persen dari total balas jasa usaha di Indonesia.

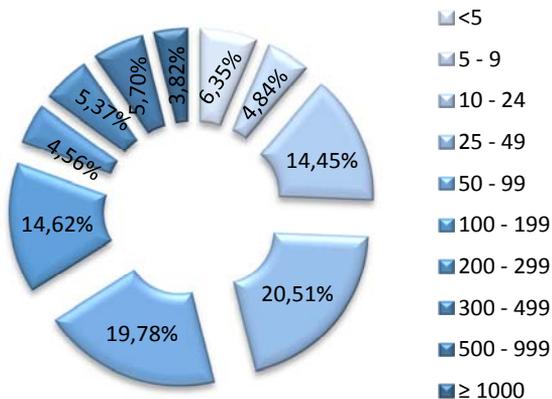
**Gambar 8. Persentase Pengeluaran Usaha Mikro dan Kecil di Beberapa Wilayah Indonesia Timur terhadap Pengeluaran Usaha di Indonesia Menurut Besarnya Tahunan 2013**



Jika dibandingkan dengan pengeluaran usaha di beberapa wilayah Indonesia Timur terhadap pengeluaran usaha di Indonesia, pengeluaran usaha di Provinsi Papua masih lebih rendah dibandingkan Provinsi Maluku. Akan tetapi lebih tinggi jika dibandingkan Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat.

#### E. PENDAPATAN

**Gambar 9. Persentase Usaha Mikro dan Kecil Menurut Besaran Pendapatan Selama Setahun (Jutaan Rp), 2013**



Dari 9.955 usaha IMK yang ada di Provinsi Papua pada 2013, pendapatan usaha IMK Tahunan 2013 sekitar 0,39 persen dari total pendapatan usaha IMK Tahunan 2013 di Indonesia. Angka ini lebih besar dibandingkan dengan Provinsi Maluku, Maluku

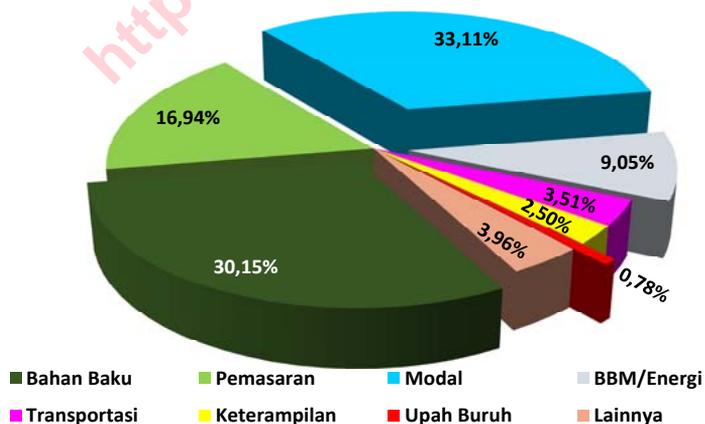
Utara dan Papua Barat. Meskipun pendapatan usaha IMK relatif kecil, tetapi tetap memberikan kontribusi terhadap perekonomian Papua.

Besaran pendapatan usaha IMK pada 2013 tiga terbesar yaitu, pada kisaran 25-49 juta Rupiah sekitar 20,51 persen lalu 50-99 juta Rupiah sekitar 19,78 persen dan 100-199 sekitar 14,62 persen. Sedangkan besaran pendapatan terendah selama 2013 pada kisaran satu Milyar Rupiah atau lebih yaitu sekitar 3,82 persen dari total pendapatan usaha IMK 2013.

## F. KENDALA USAHA

Selama menjalankan usaha Industri Mikro dan Kecil di Provinsi Papua pada 2013, sekitar 67,01 persen mengaku mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya. Sisanya merasa tidak mengalami kendala. Kesulitan usaha IMK di Provinsi Papua bermacam-macam, seperti dalam hal pengadaan bahan baku, kesulitan pemasaran, kesulitan permodalan, kesulitan masalah BBM/Energi, kesulitan masalah transportasi, kesulitan masalah terbatasnya ketrampilan pekerja, kesulitan masalah upah buruh, dan lain-lain.

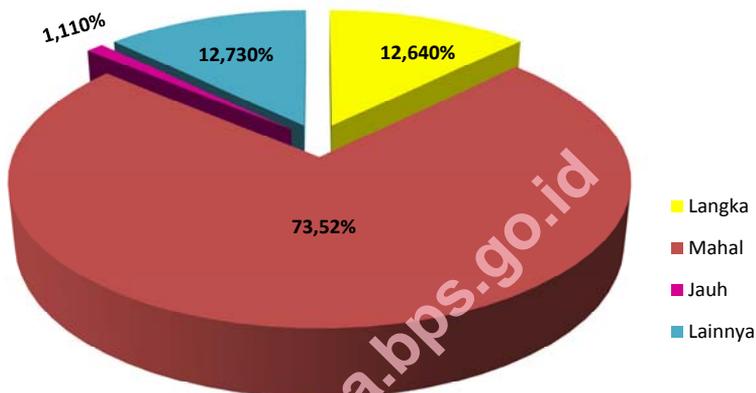
**Gambar 10. Persentase Usaha Mikro dan Kecil Tahunan Menurut Jenis Kesulitan Utama, 2013**



Jenis kesulitan utama usaha IMK di Provinsi Papua yaitu kesulitan dalam permodalan sekitar 33,11 persen dan kesulitan bahan baku (30,15 persen) dan kesulitan pemasaran sekitar 16,94 persen. Kesulitan utama

lainnya, pengadaan bahan bakar minyak sekitar 9,05 persen. Kesulitan lainnya seperti masalah cuaca, dan sebagainya (3,96 persen).

**Gambar 11. Persentase Usaha Mikro dan Kecil Tahunan Menurut Jenis Kesulitan Bahan Baku, 2013**

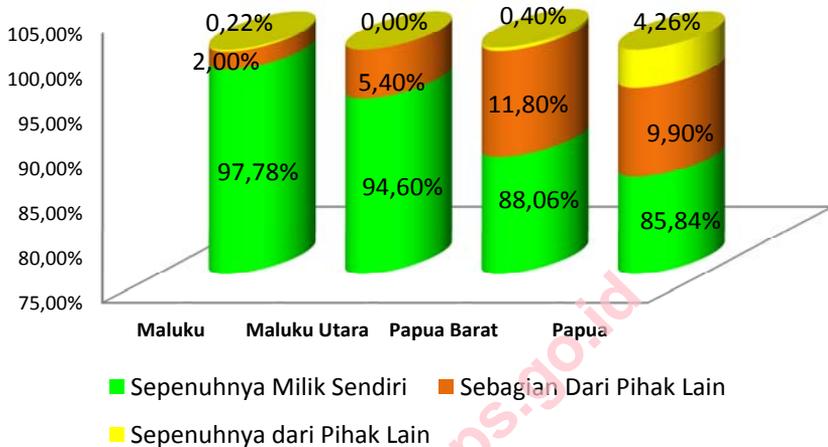


Kesulitan bahan baku yang cukup mempengaruhi kelancaran produksi usaha IMK pada 2013 umumnya disebabkan karena bahan baku yang mahal (73,52 persen), karena lainnya, misalnya kendala transportasi (12,73 persen), dan langkanya bahan baku (7,78 persen).

## **G. MODAL**

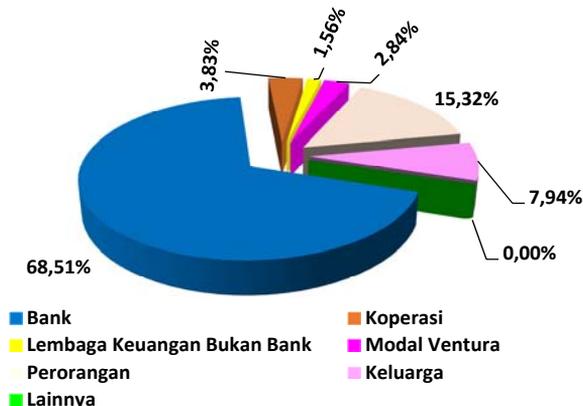
Sumber modal usaha IMK pada umumnya merupakan sepenuhnya milik sendiri, yaitu sekitar 85,84 persen, sedangkan usaha dengan modal sebagian dari pihak lain (9,90 persen) dan sepenuhnya dari pihak lain (4,26 persen). Hal ini menunjukkan bahwa usaha IMK di Papua sudah cukup mandiri karena sebagian besar modal merupakan milik sendiri, sama seperti provinsi-provinsi lain di wilayah Indonesia Timur.

**Gambar 12. Persentase Usaha Mikro dan Kecil di Beberapa Wilayah Indonesia Timur Menurut Sumber Modal, 2013**



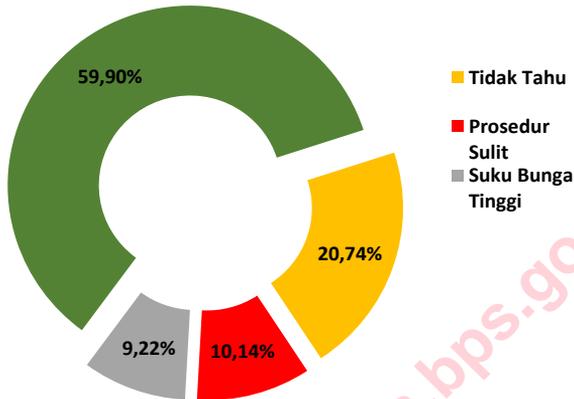
Dari seluruh usaha mikro dan kecil yang ada di Provinsi Papua yang seluruh atau sebagian modal usahanya berasal dari pihak lain, 85,84 persen tidak memanfaatkan pinjaman-pinjaman dari pihak lain. Untuk usaha-usaha yang memanfaatkan pinjaman dari pihak lain, sebagian besar usaha mendapatkan modal pinjaman dari bank (68,51 persen), pinjaman keluarga (15,32 persen), dan sisanya pinjaman-pinjaman dari koperasi, perorangan dan lainnya.

**Gambar 13. Persentase Usaha Mikro dan Kecil Menurut asal Pinjaman Utama, 2013**



## H. PERBANKAN

**Gambar 14. Persentase Usaha Mikro dan Kecil Menurut Alasan Utama tidak Meminjam dari Bank, 2013**



tidak tahu (20,74 persen), prosedur sulit (10,14 persen) dan karena alasan suku bunga tinggi (9,22 persen).

## I. KOPERASI

**Gambar 15. Persentase Usaha Mikro dan Kecil Menurut Keanggotaan Koperasi Tahun 2013**



sekitar 98,83 persen tidak menerima pelayanan Koperasi. Dari pelayanan Koperasi, pengusaha memanfaatkan pinjaman uang dan menerima pelayanan koperasi berupa bimbingan usaha masing-masing 50 persen.

Walaupun asal pinjaman utama untuk modal usaha berasal dari bank, tetapi dari sebagian yang tidak meminjam modal dari bank memiliki berbagai alasan. Alasan utamanya antara lain, umumnya tidak berminat (59,90 persen),

Manfaat Koperasi pada usaha IMK ternyata belum dirasakan oleh sebagian besar pengusaha IMK. Tercatat dari hasil VIMK13 tahunan, hanya 1,17 persen saja pengusaha yang menjadi anggota Koperasi. Sisanya

**Gambar 16. Persentase Usaha Mikro dan Kecil menurut Jenis pelayanan Koperasi yang Diterima, 2013**



#### **J. NON-KOPERASI**

Bantuan non-koperasi di sini antara lain seperti bantuan dari instansi pemerintah, perusahaan swasta, perbankan, yayasan/LSM, dan sebagainya. Bantuan dapat berupa bantuan uang, bahan baku, pemasaran, bimbingan/pelatihan/penyuluhan, mesin, barang modal/peralatan, dan lainnya.

**Gambar 17. Persentase Usaha Mikro dan Kecil Menurut Jenis Bantuan Non Koperasi yang Diterima, 2013**

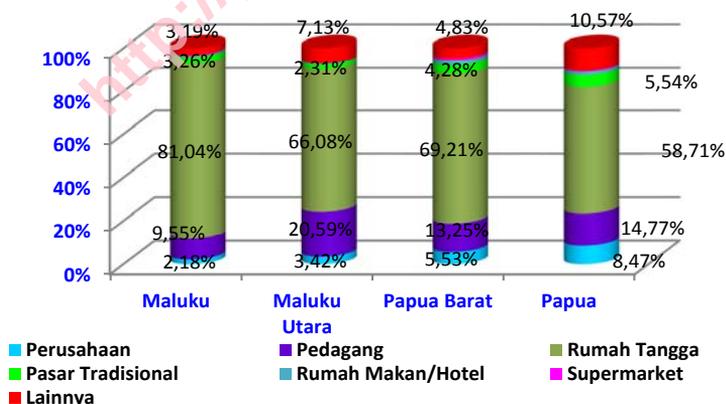


Sebagian besar (95,54 persen) usaha IMK tidak menerima bantuan dari Non Koperasi. Dari pengusaha IMK yang menerima bantuan dari Non Koperasi, seluruhnya (100 persen) menerima uang/modal dan yang menerima barang modal sekitar 6,76 persen. Ini berarti dari pengusaha yang telah menerima bantuan barang modal sebagian juga menerima bantuan uang/modal dari Non Koperasi.

## K. PEMASARAN

Pemasaran hasil produksi perusahaan dapat menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan untuk mempromosikan hasil produksinya. Pemasaran hasil produksi perusahaan IMK di Provinsi Papua sebagian besar masih digunakan oleh rumah tangga, yaitu sekitar 58,71 persen. Sisanya dipasarkan oleh pedagang (14,77 persen), lainnya (10,57 persen), Rumah Makan/Hotel (8,47 persen), Pasar Tradisional (5,54 persen) dan yang paling kecil di Supermarket (0,52 persen). Pola pemasaran di Papua sama seperti provinsi-provinsi lain di wilayah Indonesia Timur.

**Gambar 18. Persentase Usaha Mikro dan Kecil di Beberapa Wilayah Indonesia Timur Menurut Wilayah Pemasaran Hasil Produksi Perusahaan, 2013**

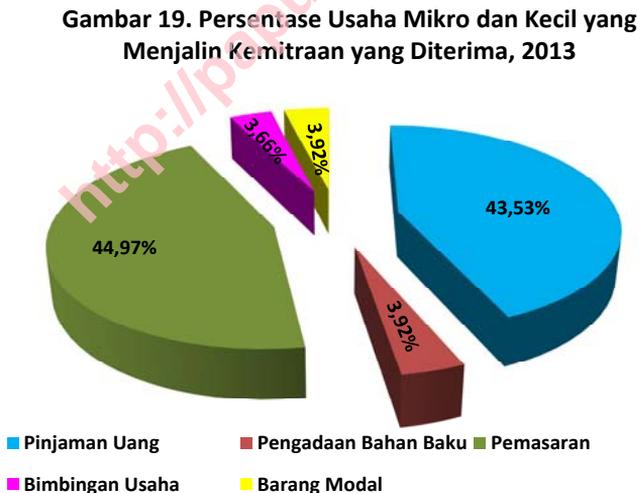


Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar barang hasil produksi IMK merupakan barang yang biasa dikonsumsi oleh rumah tangga. Sedangkan barang yang dipasarkan ke pedagang atau perusahaan biasanya untuk dijual atau diproses lagi.

## L. KEMITRAAN

Kemitraan usaha dapat dilakukan dengan badan/lembaga lain seperti instansi pemerintah, perusahaan swasta, perbankan, yayasan/LSM, maupun lainnya, baik ada memorandum of understanding (MoU) perjanjian dalam menjalin kemitraan atau tidak. Kemitraan dapat berupa bantuan uang, pengadaan bahan baku, pemasaran, bimbingan/pelatihan/penyuluhan, mesin, barang modal/peralatan, dan lainnya.

Tercatat dari hasil VIMK13 tahunan, sekitar 93,40 persen usaha tidak menjalin kemitraan. Dari sekitar 6,66 persen usaha yang menjalin kemitraan, sekitar 44,97 persen menjalin kemitraan pemasaran, sekitar 43,53 persen dari usaha yang menjalin kemitraan pinjaman uang/modal, Yang menjalin kemitraan barang modal dan pengadaan bahan baku masing-masing sekitar 3,92 persen, dan 3,66 persen usaha menjalin kemitraan bimbingan usaha.



## M. BIMBINGAN USAHA

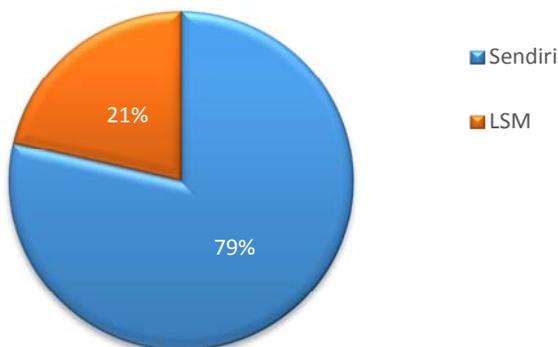
Kebanyakan usaha IMK (92,98 persen) tidak pernah mengikuti bimbingan usaha, sisanya sekitar 7,02 persen pernah mengikuti bimbingan usaha. Jenis bimbingan usaha terbanyak yang diperoleh yaitu teknik pemasaran (84,62 persen) dan ketrampilan teknik produksi sekitar 23,08 persen.

**Gambar 20. Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang Tenaga Kerjanya Pernah Mengikuti Bimbingan Usaha Menurut Jenis Bimbingan Usaha, 2013**



Penyelenggara bimbingan usaha lebih dari tigaperempat atas inisiatif perusahaan/usaha IMK sendiri, yaitu sekitar 78,57 persen. Selain itu, ada juga penyelenggara bimbingan usaha dari Lembaga Swadaya Masyarakat sekitar 21,43 persen.

**Gambar 21. Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang Tenaga Kerjanya pernah Mengikuti Bimbingan Usaha Menurut Penyelenggara Bimbingan Usaha, 2013**





# **DATA**

**MENCERDASKAN BANGSA**

<http://papua.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI PAPUA**

Gedung Pelni Lt. III Jl. Argapura No : 15 Jayapura

Telepon : 0967-534519, 533028 (Hunting), Fax. 536490

Email : bps9400@bps.go.id. Homepage : papua.bps.go.id